

GEREJA SEBAGAI MITRA NEGARA DALAM UPAYA MENJAGA MORAL ANAK BANGSA MELALUI JALUR PENDIDIKAN

Rolin Ferdilianto Sandelgus Taneo
Gereja Masehi Injili di Timor, Indonesia
korespondensi: rolintaneo0402@gmail.com

Abstrak

Pendidikan sesungguhnya adalah bagian dari proses memberdayakan manusia tetapi serentak pula memiliki maksud untuk memengaruhi seseorang untuk hidup bermartabat sebagai manusia. Karena hal ini maka pendidikan itu senantiasa bersinggungan dengan pikiran (kognitif), perasaan (afektif) dan tindakan/keterampilan (psikomotorik). Karena itu, maka aktivitas ini harus berlangsung terus-menerus hingga menjadi habit. Namun ada masalah serius yang muncul yakni sekolah bertebaran di sana-sini tetapi kejahatan moral masih terjadi. Tak jarang yang melakukan tindakan kejahatan moral adalah mereka yang berpendidikan. Mencermati fenomena ini, gereja sebagai lembaga agama yang juga punya tugas merawat iman dan moral umat pun berinisiatif memerangi masalah itu. Salah satu caranya yakni dengan jalan memanusiakan manusia melalui bidang pendidikan. Ada makna ganda dibalik keterlibatan gereja ini yakni **pertama**, mengembangkan teologi yang berakar pada konteks pembangunan sumber daya manusia. **Kedua**, keterlibatan gereja ini juga bagian dari mengimplementasikan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang salah satu butirnya yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan jalan ini maka gereja tampil sebagai mitra negara membangun peradaban manusia yang berkarakter baik lewat pendidikan. Agar tulisan ini bisa lebih terstruktur maka penulis akan mengelaborasi antara teologi sosial gereja, kajian filsafat manusia dari perspektif Driyarkara tentang pendidikan dengan konteks amanat mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendekatan atau metode yang dipakai yakni studi literatur. Tujuan akhir tulisan ini yakni memperlihatkan urgensi dari pentingnya memberdayakan hidup manusia melalui pendidikan.

Kata-kata Kunci: Pendidikan, Gereja, Teologi Sosial, Manusia

THE CHURCH AS A PARTNER OF THE STATE IN EFFORT TO MAINTAIN THE MORALS OF THE NATION'S CHILDREN THROUGH EDUCATION

Rolin Ferdilianto Sandelgus Taneo
Gereja Masehi Injili di Timor, Indonesia
Korespondensi: rolintaneo0402@gmail.com

Abstract

Education is actually part of the process of empowering humans but at the same time also has the intention to influence someone to live with dignity as a human being. Because of this, education always intersects with thoughts (cognitive), feelings (affective) and actions/skills (psychomotor). Therefore, this activity must continue to take place until it becomes a habit. However, there is a serious problem that arises, namely schools are scattered here and there but moral crimes still occur. Not infrequently those who commit moral crimes are those who are educated. Observing this phenomenon, the church as a religious institution that also has the task of caring for the faith and morals of the people also took the initiative to combat this problem. One way is by humanizing humans through education. There is a double meaning

behind the involvement of this church, namely first, developing a theology that is rooted in the context of human resource development. Second, the involvement of this church is also part of implementing the mandate of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, one of the points of which is to educate the life of the nation. In this way, the church appears as a partner of the state in building a human civilization with good character through education. In order for this writing to be more structured, the author will elaborate between the social theology of the church, the study of human philosophy from the perspective of Driyarkara on education with the context of the mandate to educate the life of the nation. The approach or method used is literature study. The final goal of this writing is to show the urgency of the importance of empowering human life through education.

Keywords: Education, Church, Social Theology, Human

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses atau usaha untuk memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia yang penulis maksudkan disini ialah memberdayakan manusia untuk sepenuhnya menjadi sadar akan statusnya sebagai yang bermartabat sehingga dapat pula menggunakan pikiran, perkataan dan tindakan yang juga mencerminkan citra dirinya sebagai manusia.

Poin ini bagi penulis penting mengingat pendidikan kita di Indonesia secara formal dilakukan secara berjenjang dengan memakan waktu hingga belasan tahun, bahkan juga puluhan tahun (jika dihitung dari bangku Sekolah Dasar hingga ke jenjang Doktor). Itu artinya, bahwa tidak hanya sebatas adanya penanaman intelektual seseorang tetapi juga diikuti dengan penanaman moral atau karakter hidup seseorang.

Hanya saja, proses memberdayakan seorang anak bangsa ini juga diperhadapkan dengan suatu kenyataan dimana masih tingginya angka pelanggaran mora di kalangan peserta didik. Sebagai contoh, pelanggaran moral itu tergambar melalui mudarnya budaya sopan santun dari peserta didik, masih tingginya angka kekerasan di kalangan pelajar, seperti tawuran, bully, atau juga kasus pelecehan. (Laure, 2024)

Belum lagi di kalangan pengajar, kita juga menjumpai berbagai macam tindakan pelanggaran moral yang mereka lakukan. Publikasi dari Laila Suhaila memperlihatkan bahwa sebenarnya ada pelanggaran moral yakni tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang oknum guru di Pulau Nias kepada siswanya ketika masih dalam suasana belajar. (Suhaila, 2021, p. 62) Atau, di kalangan pemerintah, kita bisa melihat adanya korupsi yang begitu masif terjadi hingga kadang menyebabkan banyak orang berpikir secara serius bagaimana melakukan efek jera terhadap para koruptor. Bisa juga dipastikan bahwa para koruptor ini adalah kaum terdidik.

Fakta-fakta ini seperti memperlihatkan suatu kenyataan yang bertolak belakang dari adanya pendidikan sebagai suatu tugas yang luhur. Berangkat dari kenyataan yang ada ini, penulis kemudian mencoba mengulas fakta ini dengan keprihatinan gereja terhadap situasi pendidikan yang ada. Gereja mendirikan sekolah-sekolah, atau pun juga menyerukan pesan moral lewat pemberitaannya juga bisa kita lihat sebagai suatu upaya memutus mata rantai kejahatan moral.

Dalam hal inilah maka gereja sedang menjalankan aksi konkret dari berteologi secara praksis atau menyentuh konteks. Dengan menggunakan pendekatan yang kemukakan oleh Driyarkara soal pendidikan sebagai jalan hominisasi dan humanisasi maka penulis akan memperlihatkan urgensi dari pendidikan yang harus dan terus gereja gemakan.

METODE PENULISAN

Adapun metode yang dipakai dalam tulisan ini yakni metode studi pustaka, yang pada prinsipnya menggunakan berbagai acuan literatur yang sejalan dengan topik yang diangkat oleh penulis. Referensi atau acuan yang digunakan dalam tulisan ini yang kemudian akan dikembangkan untuk membahas topik di seputaran masalah moral, peran serta gereja memerangi isu moral. Tujuan akhir dari pengutipan dimaksud yakni menjawab permasalahan yang diangkat.

PEMBAHASAN

1. Menggali Makna Pendidikan secara Umum

Pendidikan secara umum dipahami sebagai suatu usaha terencana yang pada gilirannya diharapkan membawa suatu sumbangsih bagi pengembangan kapasitas diri dari anak didik. Dalam upaya ini, perlu ada suatu cara atau metode yang harus ditempuh guna mencapai visi dari pendidikan itu sendiri. (Saragih, 2021, p. 76)

Sedangkan Menurut UU No. 20 tahun 2003, Pendidikan itu dipahami sebagai : “Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. (Amka, 2019, p. 2)

Pada prinsipnya, dua pengertian pendidikan di atas secara sadar menunjukkan bahwa adanya pendidikan dimaksudkan untuk pengembangan potensi atau kemampuan dasar pada diri seseorang. Ini tugas yang baik dan mulia. Memang manusia perlu untuk diberdayakan supaya melalui pemberdayaan itu, manusia dapat secara aktif memaksimalkan kapasitas pikiran, bahkan juga aksi di dalam menyelesaikan serangkaian masalah yang ada.

Masalah itu bisa terlihat dari dua contoh yang diangkat di bagian pendahuluan. Tentu masih ada banyak masalah lain yang harus diselesaikan, tapi bukankah masalah-masalah itu adalah masalah kemanusiaan? Itu artinya bahwa pendidikan pada akhirnya dilakukan dari manusia, oleh manusia dan untuk manusia itu sendiri.

2. Memahami Pendidikan dari Sudut Pandang Nicolaus Driyarkara

Driyarkara melihat pendidikan itu sebagai suatu aktivitas fundamental yang erat kaitannya dengan isu eksistensial. Hal ini berarti bahwa pendidikan itu sangat bersinggungan dengan upaya memberdayakan manusia. Pemberdayaan ini ialah suatu proses yang berkesinambungan. Ia tidak bisa berhenti di satu titik saja. Bahkan proses pemberdayaan itu melibatkan banyak pihak, seperti pendidik, orang tua, bahkan juga negara. Ia juga berargumen bahwa dalam proses mendidik itu, ada upaya secara sengaja atau pun tidak sengaja dari sang pendidik untuk membawa seorang manusia muda masuk ke dalam pemahaman yang luas tetapi juga tumbuh menjadi orang yang dewasa. (Sudiardja, dkk, 2006, pp. 269–270)

Penulis melihat pengertian pendidikan dari Driyarkara ini sebagai aktivitas moral dimana ada teladan yang diperlihatkan oleh pendidik kepada yang dididik. Spirit ini sejalan dengan 3 filosofi pendidikan yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara yakni *Ing ngarsa sung tuladha*, *Ing madya mangun karsa*, *Tut wuri Handayani*. Pada prinsipnya, 3 filosofi ini

bermakna seorang pendidik mampu untuk memberikan contoh atau teladan melalui sikap hidup yang baik atau pun pengetahuan, sang pendidik juga mampu memberikan ruang kepada anak didiknya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri, serta memberi dorongan yang penuh perhatian kasih kepada anak-anak didik agar mereka tumbuh menjadi orang yang autentik. (Andriany, 2024, pp. 95–96)

Pendidikan adalah jalan memberi contoh bagi yang dididik. Dengan mendidik, seseorang diajar untuk kembali pada fitrahnya sebagai manusia mulia. Ini juga yang terus dipertegas oleh Driyarkara. Ia lalu memahami pendidikan itu sebagai hominisasi dan humanisasi. Sebagaimana yang dikutip oleh Linggar Shary, hominisasi dipahami sebagai proses agar manusia tiba pada fitrahnya sebagai manusia bermartabat. Sedangkan humanisasi tingkat manusia yang bermartabat. Untuk tiba pada humanisasi maka hominisasi harus sungguh-sungguh direalisasikan. (Shary, 2022, p. 3)

Penulis mengandaikan paham ini sebagai suatu kesadaran dari Driyarkara bahwa sebenarnya pendidikan karakter itu menjadi hal fundamental. Pendidikan karakter itu penting guna manusia secara arif menggunakan akal, perkataan dan tindakannya untuk menciptakan suasana hidup yang kondusif, bahkan jika bisa hidup manusia bebas dari kejahatan.

Hanya saja, kita kini diperhadapkan dengan suatu realitas dimana semakin masifnya pendidikan dilakukan, tindakan kejahatan moral pun makin banyak. Apakah ada yang salah dengan sistem dan cara pendidikan di negeri kita ini? Pertanyaan ini sengaja penulis ajukan guna menjadi bahasan lebih lanjut pada poin berikutnya yang akan menggali lebih jauh keterlibatan gereja yang penulis coba pahami sebagai lembaga moral yang juga turut membantu menanamkan karakter anak bangsa, tidak hanya dengan seruan di mimbar gereja melalui ajaran tetapi juga mengimplementasikan melalui pendidikan formal.

3. Gereja sebagai Mitra Negara dalam Tugas Menjaga Moral Hidup

Gereja dan negara sesungguhnya adalah mitra. Untuk lebih memperjelas poin ini, penulis mengutip rumusan Pokok-Pokok Eklesiologi GMTI yang menyinggung soal relasi gereja-negara. Bagi GMTI, “*Gereja adalah bagian dari kekuatan masyarakat sipil (civil society) yang perannya sangat menentukan untuk mendorong penciptaan tatanan negara yang menghormati kedaulatan rakyat dan HAM. Dalam konteks ini gereja mesti sungguh-sungguh mengupayakan pemberdayaan dan penyiapan anggota gereja untuk peran politik demi keadilan dan kesetaraan. Hubungan gereja dan negara mesti didorong ke arah pola kemitraan dimana kedua pihak saling menghargai dan mengakui. Hubungan ini harus berlangsung setara, adil, dan tidak memaksa*”. (Pokok-Pokok Eklesiologi GMTI, 2015, p. 37)

Dengan berkaca dari pemahaman model relasi gereja dan negara yang dirumuskan oleh GMTI, maka bisa kita simpulkan bahwa baik gereja juga punya tanggung jawab besar terhadap maju-mundurinya iklim pendidikan yang baik serta integritas diri yang baik dari umat gereja. Gereja punya tanggung jawab moral untuk tetap membina iman umat baik lewat pemberitaan gereja maupun jalur formal pendidikan.

Wujud aktif keterlibatan gereja dalam dunia pendidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Darmawan, dkk ialah membentuk generasi muda yang adalah anak bangsa untuk memiliki karakter hidup yang baik. Di samping itu, partisipasi lain yang bisa gereja lakukan untuk mendukung negara dalam ranah pendidikan ialah dengan tetap mendukung pendidikan formal di sekolah-sekolah. Dalam hal ini, gereja bisa bermitra dengan negara di

dalam menyediakan program pendidikan yang menyeluruh, yang di dalamnya ada pendidikan akademik dan spiritual. Dengan mencerdaskan umatnya, gereja berperan dalam membentuk individu yang berkomitmen terhadap iman dan agama, memiliki kualitas moral yang baik, serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. (Darmawan, dkk, 2023, p. 51)

4. Gereja yang Berteologi secara Konkret dengan Konteks

Bagi penulis, pendidikan yang dilaksanakan oleh gereja itu punya dua sisi. **Pertama**, dilakukan melalui ajaran-ajaran moral yang merupakan hasil penafsiran atas teks Kitab Suci. **Kedua**, melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah yang adalah milik gereja. Dua hal ini sesungguhnya bisa dibaca sebagai aktualisasi nyata dari gereja untuk turut memanusiaikan manusia, khususnya manusia Indonesia. Tentu visi gereja ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang salah satu butirnya yakni mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Tapi, dalam tulisan ini akan lebih disorot aspek yang pertama.

Kepedulian gereja atau perhatian gereja terhadap pendidikan sesungguhnya merupakan aplikasi dari teologi sosial. Secara sederhana, teologi sosial kerap dipahami sebagai penghayatan iman orang percaya terhadap konteks sosial dimana ia hidup. Dengan mengutip pandangan dari Julianus Mojau, Rudy Harold memaknai teologi sosial itu pangkalnya ada pada pengalaman dan setumpuk persoalan sosial. Permasalahan ini kemudian dicari jalan keluarnya. Jalan keluarnya itu pertama-tama dilandaskan pada penghayatan akan karya Kristus sebagai kabar selamat (Injil) yang membebaskan. (Harold, 2017, p. 135)

Pertanyaannya di sini ialah apa yang harus gereja bebaskan seturut dengan tugas sosialnya dalam bidang pendidikan? Ternyata yang harus gereja bebaskan disini yakni perlawanan terhadap tindakan moral yang salah. Mengapa kemudian harus gereja? Dalam kaitannya dengan hal ini, penulis memahami gereja sebagai lembaga yang juga berkontribusi di dalam merawat moral hidup jemaatnya.

Mengutip apa yang disampaikan oleh Franz Magnis Suseno, moral itu berkaitan dengan tindakan baik atau buruk yang manusia lakukan serentak dari apa yang dilakukan itu mencerminkan statusnya sebagai manusia. Untuk bisa mengukur tindakan seseorang itu baik atau buruk maka dibutuhkan yang namanya norma moral. Norma moral adalah tolok ukur di dalam menilai apa yang dilakukan oleh seseorang. Penilaian itu selalu didasarkan pada kewajaran sebagai seorang manusia dan apa yang sepantasnya ia lakukan. (Suseno, 1987, p. 19)

Berdasarkan acuan ini kemudian hal ini menjadi titik fokus bagi gereja di dalam memberdayakan manusia sesuai fitrahnya. Manusia harusnya bisa melakukan tindakan yang bermoral. Dalam konteks ini juga kemudian gereja setidaknya perlu mencermati tiga prinsip seturut dengan cara menuntun umat kepada tindakan yang bermoral.

Pertama, melalui pengajaran moral, gereja menuntun para umat yang bisa dibaca sebagai anak didik untuk memiliki kesadaran pribadi. Poin ini menekankan aspek pertimbangan. Seseorang harusnya tahu apa yang harus ia lakukan dan juga tahu sejauh mana yang ia lakukan itu baik atau tidak. Inilah yang dinamakan dengan pertimbangan. Pertimbangan itu harusnya lahir dari diri sendiri. Tapi, karena tulisan ini ada dalam konteks mendidik maka bagi penulis, pendidikan yang diberikan itu yang kemudian akan mengarahkan kita pada pemahaman yang benar tentang pertimbangan kita sebelum melakukan sesuatu. (Dapiyanta, 2014, pp. 3–4)

Kedua, manusia itu punya kehendak bebas. Kehendak bebas itu menegaskan tentang apa yang dilakukan seseorang, itu berdasarkan kemauan atau kehendaknya sendiri. Karena ia melakukan itu sesuai dengan kemauannya, maka mau atau tidak mau, seseorang juga harus bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Dalam tahap ini, seseorang bisa dikatakan sebagai tuan atas apa yang dibuatnya. (Dapiyanta, 2014, pp. 4–5)

Ketiga, suatu tindakan itu bermoral apabila ia landaskan pada motivasi yang mulia. Motivasi itu tujuannya untuk kebaikan. Nilai kebaikan itu sudah tentu didasarkan pada ketulusan, tanpa pamrih. Jadi tujuan kebaikan itu tidak untuk diri sendiri melainkan sungguh demi kebaikan itu sendiri. (Dapiyanta, 2014, pp. 5–6)

Dengan mencermati hal-hal yang ada di atas, maka pembangunan sumber daya manusia yang gereja lakukan serentak menyinggung optimalisasi kemampuan diri dengan merujuk pada aspek moral sehingga itu juga berdampak pada citra diri seorang manusia terpelajar yang punya karakter baik.

5. Relevansi Pemikiran Driyarkara dan Pergumulan Gereja dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Baik

Sebagaimana yang telah disinggung dalam poin 2, pendidikan yang dimaksudkan oleh Driyarkara itu sifatnya sangat eksistensial dan juga menyinggung aspek pembentukan karakter yang holistik (kognitif, afektif dan psikomotorik). Pendidikan karakter itu semata-mata membawa seorang anak didik untuk tahu akan statusnya sebagai manusia bermartabat. Di samping itu, pendidikan karakter itu juga punya dimensi relasional. Harus ada pendidik dan anak didik. Dengan begitu, transfer karakter dan pengetahuan bisa terjalin. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam relasi ayah, ibu, dan anak. Di sini, ayah dan ibu selaku pendidik akan mengarahkan anak untuk secara bertahap untuk menjadi manusia mandiri yang mampu memanfaatkan pikiran dan tindakan secara konkret. (Asa, 2019, pp. 253–254)

Karena pendidikan itu sifatnya relasional maka tidak berlebihan untuk kemudian kita juga pakai pengertian ini untuk melihat relasi gereja dan negara dalam hal mendidik. Anggota gereja adalah juga anggota suatu negara. Itu artinya tugas dari negara bisa juga dimaknai sebagai tugas dari gereja. Terhadap adanya berbagai kejahatan moral, gereja tidak bisa tinggal diam melihat kenyataan ini. Gereja perlu untuk bersama-sama dengan negara dalam hal ini pemerintah dan lembaga pendidikan (termasuk sekolah-sekolah milik gereja) mulai bergeliat untuk menanamkan moral atau karakter hidup yang baik. Jika peranan ini sungguh-sungguh dilaksanakan oleh gereja maka penulis berkeyakinan bahwa tindakan bejat moral perlahan-lahan bisa diatasi, tetapi dengan catatan bahwa perlu pendekatan humanis yang mengedepankan aspek rasa/emosional guna mendongkrak perubahan sikap hidup yang lebih baik. Peranan gereja ini, ditaraf tertentu bisa disebut sebagai seruan dan aksi profetis konkret gereja dalam menghadirkan pertobatan hidup.

KESIMPULAN

Kita hidup di era dimana jumlah sekolah makin banyak atau bertebaran dimana-mana. Tetapi banyaknya sekolah belum menjadi penjamin bagi terciptanya kualitas manusia yang berkarakter baik. Malah, kita sekarang berjumpa dengan banyak kasus kemanusiaan yang mencerminkan suatu peradaban paradoks dimana pendidikan kian gencar dihidupi tetapi itu tidak serta-merta menyelesaikan berbagai masalah kemanusiaan. Dalam kesadaran seperti ini, memang sudah sepatutnya kehadiran gereja harus makin konkret pengajarannya. Gereja dan negara sesungguhnya adalah mitra di dalam memberdayakan manusia Indonesia. Pemberdayaan itu sifatnya holistik, yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kehadiran gereja yang terhadap konteks kejahatan moral juga bisa dilihat sebagai cara menghidupi makna teologi sosial. Praksis teologi sosial ada pada kehidupan sosial yang mengalami banyak tumpang-tindih permasalahan. Dari suasana yang riuh dengan masalah ini, khususnya kejahatan moral, gereja tampil untuk melawan kejahatan moral itu lewat ajaran dan juga mendukung pendidikan formal. Dengan jalan ini, gereja juga menghidupi makna pendidikan sebagai hubungan relasional yang diserukan oleh Driyarkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amka, H. (2019). *Filsafat Pendidikan*. Nizamia Learning Center.
- Asa, A. I. (2019). Pendidikan Karakter Menurut Ki Hadjar Dewantara dan Driyarkara. *Jurnal Pendidikan Karakter*, IX(2), 253–254.
- Dapiyanta, FX. (2014). Tindakan Bermoral. In *Dalam B.A. Rukiyanto, & Ignatia Esti Sumarah (Editor), Semakin Menjadi Manusiawi: Teologi Moral Masa Kini* (pp. 3–4). Universitas Sanata Dharma.
- Laure, M. (2024, Agustus). Krisis Moral Pendidik dan Peserta Didik. *Kemenag Kantor Wilayah NTT*. <https://ntt.kemenag.go.id/opini/629/krisis-moral-pendidik-dan-peserta-didik-Pokok-Pokok-Eklesiologi-GMIT>.
- Pokok-Pokok Eklesiologi GMIT. (2015). Majelis Sinode GMIT.
- Saragih, H. (2021). *Filsafat Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Shary, L. C. (2022). Relevansi Konsep Pendidikan Driyarkara dengan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sejarah. *Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2(1), 3.
- Suardja, dkk, A. (2006). *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*. Penerbit Gramedia.
- Suhaila, L. A. (2021). Pelanggaran Moral dan Etika Profesi Guru Berdampak dalam Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 38(2), 62.